

**PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM  
MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

**Oleh**

**Yehezkiel, NIM 2014101030**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan hukum terkait penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji adanya kekosongan norma hukum dalam pertimbangan pemberian grasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan terkait dengan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan mengacu pada aturan UUD Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010. (2) Dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, yang menjadi dasar pertimbangan terkait pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), pertimbangan kasus dari terpidana korupsi, dan batasan hak prerogatif Presiden sebagai penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Korupsi.

**THE USE OF THE PRESIDENT'S PREROGATIVE RIGHTS IN GRANTING  
GRADES TO CORRUPTION CONVICTIONS IN  
INDONESIA**

**By**

**Yehezkiel, NIM 2014101030**

**Law Department**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal regulations and considerations related to the use of the President's prerogative rights in granting clemency to corruption convicts in Indonesia. The type of research used is normative legal research by examining the absence of legal norms in considering the granting of pardon. The type of research used is a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is a description technique which is studied qualitatively juridically. The results of the research show that: (1) Regulations related to the granting of pardon by the President to corruption convicts in Indonesia, with reference to the provisions of UUD the 1945, UU Number 22 of 2002, and UU Number 5 of 2010. (2) The basis for the President's considerations in using The prerogative right to grant clemency to corruption convicts in Indonesia, which is the basis for considerations related to humanitarian considerations and human rights (HAM), consideration of cases of corruption convicts, and limits on the President's prerogative rights as respect for Indonesian constitutional law.*

**Keyword:** *Prerogative Rights, Pardon, Corruption Convicts.*